



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

---

## **DUKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Disampaikan Oleh  
MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**Pada Acara  
RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Jakarta, 1 Mei 2006**

---

***Yang terhormat Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,  
Yang terhormat para pejabat di Lingkungan Departemen Kelautan dan  
Perikanan  
Hadirin peserta Rapat Kerja Nasional Departemen Kelautan dan  
Perikanan***

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua,***

Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menyambut baik permintaan untuk menyampaikan paparan dengan tema "Dukungan Bidang Pekerjaan Umum pada sektor Kelautan dan Perikanan" pada acara Rapat Kerja Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan (Rakernas DKP). Sebagaimana telah dimaklumi bersama, kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor strategis nasional, ditinjau dari beberapa fakta antara lain, pertama luas wilayah perairan Indonesia yang melebihi luas daratannya, kedua, garis pantai yang dimiliki adalah terpanjang kedua di dunia, sekitar 81,000 km, ketiga potensi sumber daya yang terkandung didalamnya, baik dalam bentuk sumber mineral, sumber perikanan dan potensi ikutan lainnya seperti pariwisata dan jasa pelayanan transportasi masih cukup besar. Keempat, tingginya konsentrasi penduduk, permukiman berikut infrastrukturnya serta kegiatan ekonomi di sepanjang pesisir pulau-pulau besar di Indonesia. Dengan demikian, sudah sepatutnya pembangunan kelautan dan perikanan mendapatkan dukungan lintas sektor, termasuk sektor-sektor yang ada dalam kewenangan Departemen Pekerjaan Umum, meliputi infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalan dan infrastruktur ke- cipta karya, (seperti air bersih, sanitasi lingkungan, infrastruktur perumahan)

maupun penyelenggaraan penataan ruang yang dimaksudkan untuk memberikan arahan spasial pembangunan berbagai sektor.

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial budaya, maka pembangunannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumen akhir, sehingga keberadaan infrastruktur termasuk dukungannya pada sektor kelautan dan perikanan menggambarkan kemampuan produksi dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk itu pembangunan infrastruktur termasuk dukungannya pada sektor kelautan dan perikanan menuntut pemenuhan berbagai kompatibilitas atau keserasian penanganan, yaitu secara spasial : infrastruktur nasional, regional, perkotaan, dan perdesaan; pada setiap sektor, yakni transportasi jalan, sumber daya air, maupun perumahan dan permukiman; pada sektor publik dalam menetapkan kebijakan dan program; pada sektor swasta dalam partisipasinya pada penyelenggaraan industri dan jasa pelayanan infrastruktur; serta masyarakat sendiri dalam partisipasinya pada proses pembangunan, penggunaan dan pengawasan.

Dalam hal ini, pendekatan pengembangan wilayah dinilai sanggup memenuhi berbagai tuntutan kompatibilitas tersebut yang dengan basis wawasan Nusantara mengarahkan pula pembangunan kelautan termasuk perikanan dengan menggunakan instrumen penataan ruang.

***Segenap peserta Rakernas DKP yang terhormat,***

Pembangunan infrastruktur PU, diharapkan dapat menjadi landasan kuat mendukung kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Namun demikian, beberapa tantangan harus dihadapi.

Tantangan umum dalam penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dikaitkan dengan kondisi wilayah nasional yang memiliki karakteristik geografis yang beragam, dan sumber daya alam yang tidak merata. Untuk itu, strategi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum berbasis pada kondisi tingkat perkembangan setiap wilayah. Dalam perspektif ini, pembangunan infrastruktur secara nasional dibagi dalam 3 kategori.

*Pertama* pengembangan infrastruktur di kawasan telah berkembang, meliputi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dimana kegiatan ekonominya relatif telah

berkembang. Untuk wilayah ini, strategi penyediaan infrastruktur diarahkan untuk memenuhi tuntutan daya saing seiring tuntutan pertumbuhan dengan memperbesar pemanfaatan sumber dana swasta disamping dana pemerintah.

*Kedua*, penyediaan infrastruktur di Kawasan Mulai Berkembang, antara lain meliputi Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dimana pertumbuhan ekonominya dicirikan oleh kegiatan-kegiatan baru yang mulai berkembang. Untuk wilayah ini, strategi yang diterapkan adalah dengan terus mendorong pengembangan infrastruktur melalui pembangunan jalan lintas Kalimantan (Pan Borneo Highway melalui Kerjasama Sub Regional BIMP-EAGA), jalan lintas Sulawesi, beserta outlet-outlet pelabuhan Samudera dan Nusantara, terutama pelabuhan Makassar, dimana pendanaan pembangunan infrastruktur mulai melibatkan pihak swasta.

*Ketiga*, penyediaan infrastruktur di Kawasan Pengembangan Baru, meliputi kepulauan Maluku, Papua, dan seluruh Nusa Tenggara Timur, dimana pemanfaatan secara besar besaran sumber daya alam terutama lahan pertanian, sumber daya air dan potensi kelautan masih memerlukan dukungan pengembangan sistem transportasi terpadu (laut, darat, dan udara) dengan pendanaan infrastruktur yang mengandalkan terutama kemampuan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

### ***Segenap peserta rakernas DKP yang terhormat,***

Disamping tantangan umum tersebut, Departemen Pekerjaan Umum juga dihadapkan pada beberapa tantangan untuk masing-masing bidang. Di bidang tata ruang, beberapa tantangan yang dihadapi terutama belum sepenuhnya rencana tata ruang dijadikan acuan, baik bagi pembangunan nasional maupun. Selain itu, upaya pengendalian pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disepakati bersama masih dinilai kurang efektif. Tantangan ini dapat dikaitkan beberapa kondisi seperti bencana longsor dan banjir yang semakin meluas dampaknya, kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia dengan infrastruktur yang masih terbatas dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia, kesenjangan antara perdesaan dengan perkotaan, munculnya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar daerah yang berbatasan, dan kemacetan di jalur-jalur regional utama dan di perkotaan.

Di bidang sumber daya air, tantangan yang dihadapi adalah adanya kerusakan sumber daya air, seperti danau, waduk, embung, situ akibat

tingginya sedimentasi maupun akibat digunakan untuk kepentingan lain; serta pencemaran air dan sumber air akibat pengolahan limbah industri dan rumah tangga, seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan lahan untuk permukiman dan industri;

Di bidang Bina Marga, tantangan yang dihadapi secara umum adalah antara lain masih belum optimalnya kualitas pelayanan prasarana jalan terutama di jalur-jalur ekonomi seperti jalan Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Pulau Jawa, maupun jalan Lintas Selatan Kalimantan seiring dengan meningkatnya jumlah dan muatan kendaraan.

Di bidang Cipta Karya, tantangan yang dihadapi antara lain, sistem air bersih terbangun baru melayani 40 % penduduk di perkotaan dan sekitar 8 % penduduk di perdesaan.

### ***Hadirin peserta Rakernas yang terhormat,***

Dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan memperhatikan pula berbagai tantangan bidang kelautan dan perikanan terutama :

*Pertama*, masih belum termanfaatkannya potensi-potensi pada kawasan andalan laut secara optimal oleh sektor-sektor terkait. Untuk sumber daya perikanan misalnya, pemanfaatan potensinya baru mencapai sekitar 50 %.

*Kedua*, belum mantapnya ungsi kota-kota pada wilayah pesisir (baik pusat kegiatan nasional, wilayah, maupun lokal) secara optimal sebagai pusat pelayanan jasa-jasa dan hasil produksi sumber daya kelautan, karena keterbatasan infrastruktur pendukung

*Ketiga*, masih belum terintegrasinya pengelolaan wilayah hulu dan hilir, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan pendangkalan wilayah pesisir pada bagian hilir. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari masih lemahnya pengendalian pembangunan pada wilayah hulu dan sepanjang daerah aliran sungai seperti misalnya terdapat pemanfaatan kawasan lindung untuk permukiman.

*Keempat*, penurunan kualitas ekosistem pesisir, misalnya semakin berkurangnya luasan hutan bakau, sebagai akibat dari penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah yang antara lain disebabkan belum diikutinya secara penuh rencana tata ruang yang ada maupun masih

diperlukannya perbaikan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Ekosistem hutan bakau pada saat ini banyak dialihfungsikan menjadi lahan tambak, permukiman, maupun industri.

*Kelima*, masih rendahnya kualitas lingkungan pada kawasan permukiman para nelayan, salah satunya karena terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang berdampak pada rendahnya produktivitas kawasan nelayan tersebut.

*Keenam*, masih rendahnya aksesibilitas antara sentra-sentra produksi kelautan dengan pasar disekitar kawasan, karena kondisi jalan ataupun akses yang belum tembus. Kondisi ini semakin kurang pada sentra-sentra produksi kelautan yang berada pada wilayah pesisir pulau-pulau kecil.

*Ketujuh*, keterbatasan dukungan jaringan irigasi pantai untuk mendukung budidaya perikanan tambak serta keterbatasan kemampuan penanganan pantai seperti terjadinya erosi, abrasi dan pendangkalan yang antara lain karena cakupan wilayah pantai yang sangat luas.

*Kedelapan*, munculnya konflik pemanfaatan ruang wilayah lautan yang sifatnya lintas daerah otonom yang saling berbatasan, misal terjadi di Teluk Tomini, Selat Makassar, dan Laut Jawa, atau yang sifatnya lintas wilayah negara, seperti terjadi di Selat Maluku dan Laut Sulawesi.

### ***Hadirin peserta Rakernas yang terhormat,***

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka dalam Renstra Departemen Pekerjaan Umum 2005 - 2009 telah dirumuskan 3 kebijakan untuk mencapai tersedianya infrastruktur PU yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan.

*Pertama* pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di kawasan perbatasan, daerah terisolir, daerah konflik dan daerah bencana, serta rawan bencana untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.

*Kedua* pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Hal ini seiring efektifnya otonomi daerah, dimana pembangunan infrastruktur pada tingkat lokal yang pada prinsipnya sudah didesentralisasikan menjadi tugas daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didukung melalui penyusunan, penetapan dan penyebarluasan NSPM

(norma, standar, pedoman, dan manual) seluruh bidang pekerjaan umum untuk melengkapi produk-produk pengaturan yang ada sekarang, penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun pendampingan dalam pemberdayaan komunitas seperti perumahan nelayan.

*Ketiga* pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, termasuk di dalamnya pusat produksi kelautan dan perikanan, mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Arah pengembangan wilayah nasional tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini tengah dalam proses revisi, dimana RTRWN ini memuat arahan pola dan struktur pemanfaatan ruang. Pola pemanfaatan ruang nasional memuat arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya, sementara struktur ruang wilayah nasional memuat arahan sistem permukiman nasional (perkotaan dan perdesaan) dan prasarana wilayah.

Sebagai wujud kesatuan antara matra laut, udara, dan daratan, maka pengembangan kawasan andalan tidak hanya dilakukan di ruang darat, namun juga dilakukan di ruang laut karena adanya kegiatan produksi dan jasa atau sistem ekonomi wilayah yang saling terkait, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Terkait dengan hal ini, dalam RTRWN telah ditetapkan adanya 31 Kawasan Andalan Laut yang berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan potensi sumber daya, serta orientasi dan keterkaitannya dengan kota-kota serta kawasan andalan di darat.

Dalam rangka mendukung pusat produksi dan pusat permukiman maka pembangunan infrastruktur akan dikembangkan seiring arah pembangunan sistem kota, agar terstruktur dan dapat melayani lalu-lintas secara efisien sesuai hirarki, diarahkan dari pusat produksi menuju outlet dalam rangka mendukung ekspor, dan pembangunan jaringan jalan perkotaan diarahkan mendukung peran kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi dan sekaligus sebagai pembentuk struktur kota, pembangunan jalan di daerah yang telah berkembang di dorong melalui sistem jalan tol mengingat dapat dipenuhinya kelayakan finansial.

Dukungan infrastruktur juga diarahkan untuk peningkatan penyediaan air baku, air minum, pembinaan sistem pengelolaan persampahan, sanitasi dan drainase kota agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bertahap seiring dengan upaya pemenuhan agenda *Millenium Development Goals* (MDG). Pengembangan infrastruktur permukiman didorong untuk mengintegrasikan kesalingterkaitan antara skala lingkungan, kawasan, serta keseluruhan kawasan perkotaan dan perdesaan.

***Hadirin peserta Rakernas yang terhormat,***

Sejalan dengan kebijakan dan tantangan terutama sektor kelautan dan perikanan, maka dukungan program Departemen Pekerjaan Umum terhadap pembangunan kelautan dan perikanan sebagai penjabaran renstra Departemen Pekerjaan Umum 2005 – 2009 sebagai berikut:

*Pertama* program yang mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbasis penataan ruang untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, antara lain (i) penataan ruang termasuk penyiapan NSPSM bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan terpencil, (ii) peningkatan kebutuhan air baku untuk pulau kecil dan terpencil seperti di propinsi Riau, Sangehe Talaud, Maluku dan NTT, (iii) perlindungan pantai termasuk permukiman nelayan dari abrasi pada pulau-pulau kecil, (iv) pembangunan jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional bukan tol sepanjang 3.000 km di pulau-pulau terpencil dan daerah terisolasi, (v) pembangunan infrastruktur permukiman di pulau-pulau terpencil dan daerah tertinggal di 11 propinsi

*Kedua*, program mendukung kebijakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur untuk mendorong otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip Good Governance, antara lain (i) bantuan teknis penataan ruang di kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, (ii) penguatan kapasitas daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana pemasaran, termasuk infrastruktur air bersih di pelabuhan maupun di lokasi pendaratan ikan.

*Ketiga*, program yang mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan serta keseimbangan pembangunan antar daerah, antara lain (i) operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kawasan sebagai acuan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Melalui ketersediaan rencana tata ruang sebagai acuan spasial,

maka diharapkan semua potensi kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, (ii) pengembangan kawasan strategis nasional, termasuk kawasan andalan laut, (iii) program pengamanan pantai sepanjang 15.000 m, (iv) peningkatan kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh dan nelayan seluas 1.700 Ha yang mencakup 4,2 juta unit, (v) peningkatan akses jalan di kws cepat tumbuh di daerah pinggiran kota melalui kawasan desa pusat pertumbuhan serta kawasan agropolitan termasuk kawasan produksi kelautan dan perikanan di 31 propinsi dalam rangka meningkatkan keterkaitan hubungan desa-kota

Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan produktivitas dari permukiman di pesisir pantai melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman nelayan, pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan di pesisir pantai yang potensial, dimana upaya ini dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar terjamin keberlanjutannya. Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kemudahan kegiatan usaha maupun kegiatan koleksi dan distribusi (termasuk pemasaran) hasil-hasil laut dan perikanan serta budidaya di kawasan pesisir.

### ***Hadirin yang saya hormati***

Sebagai penutup dari uraian ini, perlu kami garis bawahi kembali bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan sangat strategis bagi pembangunan ekonomi nasional sebagai sumber protein memenuhi kebutuhan nasional maupun untuk terus dikembangkan bagi pemasukan devisa melalui ekspor mengingat potensinya yang cukup besar sehingga merupakan salah satu program strategis mendukung kebangkitan ekonomi nasional. Agar lebih kompetitif dan berkelanjutan, maka dukungan dari sektor-sektor lain termasuk bidang Pekerjaan Umum perlu diselenggarakan secara terpadu berdasarkan pengembangan wilayah dengan instrumen penataan ruang. Melalui penerapan prinsip keterpaduan tersebut, diharapkan akan tercipta pola dan struktur ruang wilayah yang efisien dan efektif yang dicapai secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, yang sekaligus juga dapat mendukung atau pun menjawab kebutuhan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan secara optimal. Terakhir, kami mengajak seluruh jajaran di Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Kelautan dan Perikanan

untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat agar dapat secara bersama-sama mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta lebih sejahtera ke depan.

Demikian, atas perhatian seluruh peserta Rapat Kerja Nasional Kelautan dan Perikanan, kami mengucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh***

**Menteri Pekerjaan Umum**

**DJOKO KIRMANTO**